



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 22 Maret 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
UNIT KERJA : SEKRETARIAT JENDERAL

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ESTI BUDIYARTI
2. Jabatan : KEPALA BIRO HUKUM, KERJA SAMA DAN ORGANISASI
3. NHK : 165100

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 2.207.000.000

1. Tanah Seluas 77 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 65.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 133 m2/70 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 60 m2/50 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 1371 m2/400 m2 di KAB / KOTA KARANGANYAR, WARISAN Rp. 700.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 109 m2/54 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 600.000.000
6. Tanah Seluas 100 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 120.000.000
7. Tanah dan Bangunan Seluas 157 m2/60 m2 di KAB / KOTA BANTUL, WARISAN Rp. 157.000.000
8. Tanah Seluas 97 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 115.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 4.000.000

1. MOTOR, YAMAHA SEPEDA MOTOR Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 4.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 50.000.000**D. SURAT BERHARGA** Rp. ----**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 4.600.000



F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	2.265.600.000
III. HUTANG	Rp.	181.843.093
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	2.083.756.907

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.